

## ■ PENDIDIKAN



Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.

## Jadi PTN-BH, Unesa Harus Bertransformasi Tingkatkan Tata Kelola

UNIVERSITAS Negeri Surabaya (Unesa) sebagai PTN-BH terus melakukan transformasi dan meningkatkan reputasi di tingkat nasional dan internasional.

Rektor Unesa, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., meminta jajarannya untuk memperkuat kolaborasi untuk memperkuat fondasi bagi Unesa PTN-BH baik dari aspek kinerja maupun tata kelola lembaga yang lebih produktif.

Selain itu, juga perlu memiliki mindset entrepreneurship. Civitas Unesa harus punya program karya atau produk inovatif yang dibutuhkan masyarakat, harus berani berkreasi, berani membuat lompatan untuk kemajuan.

"Unesa merupakan PTN-BH besar yang harus memberikan dampak besar bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tidak ada artinya kalau yang kita lakukan tidak punya dampak bagi lembaga dan masyarakat," kata Prof Nurhasan, Rabu (17/4).

Beberapa waktu lalu rektor yang akrab disapa Cak Hasan itu melakukan penyegaran pada pejabat di lingkungan Unesa. Cak Hasan optimis terjadi transformasi besar-besaran di bidang akademik dan non-akademik, termasuk kurikulum yang harus lebih adaptif, sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri (dudi).

Kerja sama produktif dengan mitra usaha dan industri perlu diperbanyak. Mata kuliah pun perlu dibedakan mana yang relevan dan yang tidak. Mata kuliah yang tidak relevan bisa diganti dengan yang lebih relevan sesuai tuntutan perubahan zaman sekarang dan ke depan.

"Kita perlu wujudkan ekosistem inovasi, hilirisasi riset, dan publikasi. Perlu rumusan agenda unggulan dan revitalisasi berbasis pendekatan multidisipliner. Unesa harus produktif melahirkan publikasi bereputasi internasional dan terindeks Scopus," tuturnya.

Target ke depan bagaimana peringkat Unesa bisa naik. "Kalau di tingkat nasional sudah cukup bangga, karena sudah memenuhi target IKU (Indikator Kinerja Utama, red). Target IKU ke depan bisa masuk 10 besar dari 21 PTN-BH," kata Wakil Rektor III, Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Publikasi, dan Peningkatan Universitas, Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd.

Selain itu, prioritas lainnya yaitu meningkatkan reputasi dan rekognisi di tingkat internasional dengan mendorong lagi publikasi terindeks Scopus semakin meningkat baik dari jumlah maupun kualitasnya. Dengan begitu, diharapkan posisi Unesa di berbagai lembaga pemeringkatan dunia bisa terus meningkat. (rmt/rak)

# Pemkot Surabaya Usulkan SERR ke Pusat, Koneksikan Juanda dan Tanjung Perak

TAMAN SURYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah mengusulkan pembangunan Surabaya East Ring Road (SERR) ke pemerintah pusat. Pembangunan SERR itu bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas kendaraan yang akan ke Bandara Juanda maupun Pelabuhan Tanjung Perak.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa pihaknya telah mengusulkan pembangunan proyek SERR ke pemerintah pusat. Saat ini, masih dalam tahap untuk menentukan trase atau jalur proyek tersebut.

"SERR sudah kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kita lagi tentukan (jalurnya). Kalau sudah clear, baru kita lakukan pembebasan lahan," ujar Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (17/4).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pembebasan lahan untuk proyek SERR rencananya akan dilakukan gabungan antara Pemkot Surabaya dan pemerintah pusat. Namun sebelum tahap itu dilakukan, maka ditentukan untuk jalur proyek tersebut.

"Jadi kita pastikan jalurnya dulu, baru dilakukan pembebasan. Dan SERR juga terkoneksi dengan JLLT (Jalur Lingkar Luar Timur), karena untuk menyelesaikan masalah kemacetan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad menyampaikan, trase proyek SERR akan membentang mulai kawasan



SERR: Jalan di kawasan Jembatan Suroboyo nantinya akan terkoneksi dengan Surabaya East Ring Road yang menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Kedung Cowek hingga Gunung Anyar. "Itu akan menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak," kata Irvan.

Namun, Irvan menyebut, jika trase atau jalur proyek SERR berbeda dengan JLLT. SERR berada lebih luar dan melintasi kawasan konservasi mangrove dengan konsep elevated atau jalan layang. "Jadi itu memang harus elevated, berada di atas. Karena memang di bawahnya tetap kawasan hijau," bebernya.

Menurut Irvan, SERR bisa menjadi alternatif pengganti

Tol Tengah Kota. Sebab, dari hasil kajian lalu lintas maupun land acquisition, pembangunan Tol Tengah Kota akan lebih banyak menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas.

"Tol Tengah banyak melintasi kawasan padat. Dari faktor Amdal Lalin sesuai kajian kita itu akan membebani, di gate-gate tolnya itu akan menimbulkan dampak lalu lintas" bebernya.

Oleh sebabnya, Irvan menyebut bahwa Pemkot Surabaya mengusulkan SERR ke pemerintah pusat sebagai alter-

natif pengganti Tol Tengah Kota. Karena itu, pihaknya berharap, Tol Tengah Kota tidak dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tetapi diganti dengan SERR.

"Jadi harapan yang kita usulkan ke pemerintah pusat dalam RTRW itu (Tol Tengah) tidak dimasukkan, tapi diganti SERR," ujar mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya ini.

Lebih dari itu, Irvan menilai, bahwa pembangunan proyek SERR ini akan meminimalisir biaya untuk pembebasan lahan. Sebab, jalur

proyek tersebut akan lebih banyak melintasi aset-aset milik Pemkot Surabaya. "Jadi banyak melewati aset milik pemkot," ungkapnya.

Pihaknya berharap, keberadaan SERR akan semakin meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas kendaraan di Kota Surabaya. Rencananya, proyek SERR ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). (dim/rak)

## Hingga Triwulan I, 5.566 Desa sudah Menerima Penyaluran Dana Sebesar Rp 8,05 Triliun

KEMBANG JEPUN - Hingga triwulan I tahun 2024, penyaluran Dana Desa di Jawa Timur mencapai 37, 31 persen atau senilai Rp 3,04 triliun. Jumlah tersebut sudah tersalurkan ke 5.566 desa.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jatim Budi Sarwoto, Rabu (17/4). Diketahui Jatim masih menjadi tiga besar provinsi terkait penerimaan dana desa (DD). Pada tahun ini, jumlah dana desa dari pemerintah pusat yang didapat sebesar Rp 8,05 triliun.

"Sama seperti 2023, angka itu masih berpotensi bertambah. Acuannya tahun 2023. Dana desa tahun lalu awalnya berjumlah Rp 7,9 triliun. Pemerintah pusat lantas menambah Rp 208 miliar di akhir tahun," jelasnya.

Budi mengaku pihaknya masih terus melakukan monitoring terkait penyaluran Dana Desa. Menurutnya, Pemprov sudah menyebar surat edaran agar kabupaten/kota segera mencairkan. Tujuannya agar dana desa bisa segera diman-



Budi Sarwoto

faatkan masyarakat. Untuk penggunaannya terus dikawal. Tidak hanya untuk penanggulangan kemiskinan. Penggunaan dana desa juga bisa dipakai dalam program ketahanan pangan," katanya.

Penggunaan dana desa lanjut Budi, juga bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi dan penanganan stunting.

Budi menambahkan bahwa dana desa juga diperuntukkan pada sektor pembangunan. "Ada pula yang untuk pemberdayaan masyarakat. Wujudnya

berupa bantuan tunai langsung (BLT). Hingga kini, penyaluran BLT dari dana desa sudah mencapai Rp804,3 miliar," jelasnya.

Berdasar data DPMD Jatim, tercatat ada tiga desa di Jatim yang tidak dapat menyalurkan Dana Desa tahun 2023. Yaitu dua desa di Kabupaten Sidoarjo (Desa Besuki dan Desa Pejajaran Kecamatan Jabon) yang tidak disalurkan karena penggabungan desa. Serta satu desa di Kabupaten Jember (Desa Pocangan Kecamatan Sukowono) karena keterlambatan pengajuan penyaluran dana desa.

Sementara untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa terdapat 3 desa yang tidak dapat menyalurkan. Yaitu dua desa di Kabupaten Sidoarjo (Desa Besuki dan Desa Pejajaran Kecamatan Jabon) yang tidak disalurkan karena penggabungan Desa. Dan Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban karena berdasarkan hasil musyawarah desa tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai kriteria untuk menerima BLT. (mus/rak)

## Disnakertrans Terima 25 Aduan Pelanggaran THR

KEMBANG JEPUN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur menerima sebanyak 25 aduan terkait perusahaan yang melanggar aturan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR). Ada yang terlambat memberikan THR. Ada pula yang tidak memberikan tunjangan hingga lebaran usai.

Angka aduan THR pada lebaran Idul Fitri tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Catatan Disnakertrans Jatim, ada sebanyak 51 aduan terkait dugaan pelanggaran THR yang masuk pada tahun 2023.

Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto membenarkan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah aduan mengenai THR tersebut. Saat ini, aduan yang masuk sedang didalami karena kasusnya beragam. "Laporan masih akan didalami. Sementara memang kasusnya beragam," ujarnya, Rabu (17/4).

Dalam proses pendalaman, Sigit menyampaikan

bahwa sesuai prosedur nantinya baik pelapor maupun terlapor akan dikonfirmasi sekaligus klarifikasi soal aduan yang masuk. Kini, pihaknya segera menyiapkan pemanggilan.

"Dari 25 laporan, perbedaannya berbeda-beda. Ada tiga yang selesai ditangani kabupaten/kota. Empat laporan ditindaklanjuti pengawas. Dan sisanya diurus Tim Satgas THR," jelasnya.

Sigit mengatakan bahwa posko masih dibuka hingga saat ini. Dia mempersilakan jika masih ada pekerja yang ingin melapor. Ada petugas yang standby di posko. Disnakertrans pun menyarankan agar persoalan dituntaskan secepatnya.

"Kami tak tinggal diam. Jika perusahaan terbukti melanggar aturan, maka ada sanksi sesuai undang-undang. Sanksinya bertahap. Yang pertama bisa teguran tertulis. Setelah itu bisa juga pembatasan usaha," pungkaskannya. (mus/rak)

## 23 Tahun Belum Rampung, Pembangunan Jalan Pantai Selatan Jatim Perlu Percepatan

KEMBANG JEPUN - Telah berlangsung selama 23 tahun lebih, pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) di Jawa Timur belum juga rampung. Berdasarkan dokumen RPJPD panjang jalan yang sudah terbangun sekitar 350 kilometer atau baru 55-60 persen dari target.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai pembangunan jalur Pansela wilayah Jatim atau JLS (Jalur Lingkar Selatan) yang menghubungkan delapan Kabupaten di Jatim, perlu percepatan.

Keberadaan jalan yang membentang dari Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Banyuwangi itu, menurut LaNy-

alla akan mampu meningkatkan perekonomian di wilayah selatan Jatim.

"Pembangunan Jalur Pansela wilayah Jatim perlu terus didorong sebagai solusi untuk menghilangkan disparitas antara kawasan utara dan selatan Jatim yang memang timpang saat ini," ujar LaNyalla di sela kegiatan reses, Rabu (17/4).

Dikatakan LaNyalla, wilayah selatan Jatim belum maksimal menyumbang pertumbuhan perekonomian di Jatim. Berdasarkan data Bappeda Jatim, wilayah selatan Jatim hanya menyumbang 16 persen produk domestik regional bruto (PDRB) sepanjang 2023. Se-



PANSELA: Jalan Jalur Lintas Selatan di Tulungagung yang sudah bisa digunakan untuk arus mudik Lebaran kemarin.

dangkan wilayah utara menyumbang 40 persen terhadap perekonomian Jatim. "Padahal potensi wilayah se-

latan Jatim sangat besar. Mulai dari pertanian, perkebunan hingga sektor pariwisata," tambahnya.

Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti anggap penting jalur Pansela karena itu penyelesaiannya harus dipercepat. Karena itulah, percepatan pembangunan proyek jalan yang dulunya bernama Jalur Lintas Selatan atau JLS harus menjadi prioritas. Dilanjutkan LaNyalla, permasalahan pembebasan lahan yang menjadi urusan dari Pemerintah Kabupaten harus dikoordinasikan dengan baik dengan Pemprov maupun Pemerintah Pusat.

"Saya berharap proyek jalur

lintas selatan Jatim itu harus jadi prioritas Pemprov Jatim dan Pemkab/kota di bawahnya, pada periode kepemimpinan kepala daerah terpilih di akhir tahun ini," tegasnya.

Jalan Pansela, secara total, melewati lima provinsi yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

Di Jawa Timur, Jalan Pansela memiliki panjang sekitar 628 kilometer yang akan menghubungkan delapan kabupaten yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi. (mus/rak)